



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BLITAR**

RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA SKPD)  
TAHUN 2015

---

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Semeru No. 40 Telp./Fax 0342-805022 email : [satpolpp@blitarkab.go.id](mailto:satpolpp@blitarkab.go.id) – BLITAR

---

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011– 2016 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2015.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Blitar, September 2014  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BLITAR

TOHA MASHURI,S.Sos,MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700219 199003 1 002

# **DAFTAR ISI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Menghadapi perubahan yang sedang dan yang akan terjadi di masa mendatang, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Kerja dan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerjanya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 adalah membantu Bupati dalam menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015. Rencana Kerja (Renja) Satpol PP tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011– 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2015.

### 1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja SATPOL Tahun 2015 adalah menyediakan acuan arah kebijakan program dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan di SATPOL PP Kabupaten Blitar Tahun 2015.

Tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah serta menjadi tolak ukur dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah.

### 1.2 Sistematika

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

## BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2013, Analisis kinerja pelayanan, Isus-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

### 3.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

## BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 (n-2)

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2013 terdiri dari 8 (delapan) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, adalah sebagai berikut. :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
  - g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
  - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Non Formal
  - b. Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



- a. Kegiatan Pengamanan Wilayah
  - b. Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas
- a. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- a. Kegiatan Diklatsar Linmas
  - b. Kegiatan Diklat Secure Linmas Inti
  - c. Kegiatan HUT Linmas
  - d. Pembinaan Linmas di Wilayah Kecamatan
  - e. Lomba Siskamling se-Kabupaten Blitar
  - f. Diklatsar Secure Linmas Tk. SLTA
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
- a. Kegiatan Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Miras, Narkoba dan Penyuluhan Perda.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

### a. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2013 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pengamanan Wilayah
  - b. Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Diklatsar Linmas

- b. Kegiatan Diklat Secure Linmas Inti
  - c. Kegiatan HUT Linmas
  - d. Pembinaan Linmas di Wilayah Kecamatan
  - e. Lomba Siskamling se-Kabupaten Blitar
  - f. Diklatsar Secure Linmas Tk. SLTA
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), dengan kegiatan :
- a. Penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
4. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan kegiatan :
- a. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan

Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Blitar

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	STANDART IKK (PP-6/2008)											
A.	Aspek Pelayanan Umum											
1.	Pelayanan Penunjang - Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban Masyarakat											
	a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		2 : 10.0000					1	1	50%	-	
	b) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		60 org/ 10.000					59	65	100%	-	
	c) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		1 pos/ RT					0,20	0,31	31%	-	
II.	SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI NO. 69 TAHUN 2012)											
A.	Pelayanan Dasar Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat											
	d) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	100 %						85%	100%	100%	-	
	e) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3x sehari						2x	2x	66%	-	
	f) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab/Kota	1 orang tiap RT						0,95	1,06	100%	-	

### 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Blitar adalah :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di SATPOL PP
2. Jumlah SDM SATPOL PP yang sudah mengikuti Diklat Dasar Pol PP masih sedikit
3. Kurangnya peran aktif PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda
4. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan PKL, penanganan Anak Jalanan/Gepeng serta Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penambangan Pasir
5. Kurangnya kerjasama dengan Polri/TNI, Kejaksaan dan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program peningkatan disiplin aparatur
- 2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
- 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

##### 1. Tujuan

- Menegakan Peraturan dan Perundang-undangan
- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

##### 2. Sasaran

- Terwujudnya penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya secara optimal
- Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

#### 3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015 terdiri dari :

##### a. Program

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Peningkatan disiplin aparatur.
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 6) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
- 7) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

##### b. Kegiatan

- 1) Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 4) Peningkatan Operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar
- 5) HUT dan Jambore Satpol PP
- 6) Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- 7) Pengamanan Wilayah
- 8) Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
- 9) Belanja makan dan minum Petugas Keamanan
- 10) Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda
- 11) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
- 12) Pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka pemilu Daerah ( pilihan Bupati ) tahun 2015
- 13) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

### **3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan perkiraan maju Tahun 2016**

Rumusan rencana program untuk tahun 2015 serta perkiraan maju tahun 2016 tidak lepas dari Rencana Strategis tahun 2011-2016, dengan mengacu pada pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, baik tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, secara keseluruhan pada tahun 2015 terdiri dari 7 program dan 13 kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2015  
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Urusan Wajib</b>								
19	<b>Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>								
	301	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Presentase pelayanan administrassi perkantoran sesuai rencana	Satpol PP kab Blitar	90%			95%	
	20	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian		12 bulan	454.401.000	APBD II	12 bulan	499.841.100
	302	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Satpol PP kab Blitar	90%				
	45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		16 paket	508.000.000	APBD II	6 paket	558.800.000
	03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya	Satpol PP kab Blitar	90%			90%	
	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya		200 set	240.300.000	APBD II	200 set	264.330.000
	06	Peningkatan Operasi penertiban disiplin aparaturnya dan pelajar	Jumlah Operasi penertiban disiplin aparaturnya dan pelajar		20 giat	31.600.000	APBD II	25 Giat	34.760.000

			05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Prosentase Jumlah Personil yang mengikuti Pelatihan Dasar	Satpol PP kab Blitar	20%				20%	
			04	HUT dan Jambore Satpol PP	Terlaksananya HUT dan Jambore Satpol PP		2 kali	127.840.000	APBD II		2 kali	140.624.000
			03	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Tehnis Satpol PP		4 kali	121.650.000	APBD II		4 kali	133.815.000
			15	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>		Satpol PP kab Blitar						
			08	Pengamanan Wilayah	Jumlah Patroli dan Pengamanan Wilayah		165 kali	257.800.000	APBD II		165 kali	283.580.000
			11	Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah		35 kali	92.220.000	APBD II		35 kali	101.442.000
			12	Belanja makan dan minum Petugas Keamanan	Tersedianya Makanan dan minuman petugas keamanan		10 bulan	293.724.000	APBD II		10 bulan	323.096.400
			13	Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda	Terlaksananya Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda		8 kali	89.450.000	APBD II		10 kali	98.395.000
			19	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan</b>		Satpol PP kab Blitar						
			01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terlaksananya pelatihan Linmas		2 kali	120.645.000	APBD II		3 kali	132.709.500
			02	Pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka pemilu Daerah ( pilihan Bupati ) tahun 2015	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pilkada 2015		1 tahun	6.000.000.000	APBD II		-	-



		20	Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)							
		01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	2 kali	22.370.000	APBD II		-	-
<b>JUMLAH</b>						<b>8.360.000.000</b>				<b>2.071.551.900</b>

Blitar, September 2014

KEPALA SATPOL PP  
KABUPATEN BLITAR

TOHA MASHURI,S.Sos,MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700219 199003 1 002

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2015 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2015 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM daerah Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011 – 2016 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2015.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Blitar, September 2014

KEPALA SATPOL PP  
KABUPATEN BLITAR

TOHA MASHURI,S.Sos,MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700219 199003 1 002